

BORYOKUDAN

Organisasi Kejahatan di Jepang

Oleh: Mathius Salempang

1. Umum

Membicarakan organisasi kejahatan, orang akan segera mengingat Mafia, Yakuza dan sebagainya. Oleh karena demikian berpengaruhnya organisasi kejahatan tersebut maka setiap media massa menyajikan informasi tentang kejahatan dengan kualitas tinggi, masyarakat serta-merta mengkaitkan kejahatan tersebut dengan salah satu organisasi kejahatan di mana kejahatan tersebut terjadi misalnya, kasus racun maut yang terjadi di Tokyo dalam stasiun kereta api bawah tanah. Sebelum kasus tersebut dapat diungkap oleh Polisi Jepang, tidak sedikit orang mengkaitkan kasus tersebut dengan organisasi kejahatan yang ada di Jepang, yang sesungguhnya ini terus dilakukan oleh salah satu sekte kepercayaan yang selama ini "hampir" lepas dari perhatian polisi Jepang.

Organisasi yang ada di Jepang, oleh masyarakat bukan Jepang lebih populer dengan nama Yakuza. Terdapat pula kesan seolah organisasi kejahatan di Jepang hanya ada satu yaitu Yakuza, sedangkan pada kenyataannya organisasi kejahatan diidentifikasi oleh NPA (National Police Agency) adalah 24 organisasi dengan jumlah anggota 51.820 orang. Hampir tidak ada prefektur (Prefectural Police) yang ada di Jepang, termasuk NPA, yang menggunakan istilah Yakuza. Nama Yakuza hanyalah sebuah istilah yang secara historis melekat pada orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan berpakaian compang-camping. Pemerintah Jepang termasuk NPA dan seluruh jajarannya menggunakan istilah *Boryokudan* bahkan masyarakat Jepang

yang ditanya tentang apa dan siapa Yakuza, akan segera menjawab Yakuza adalah orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan berpakaian compang-camping. Sebaliknya bila ditanya apa dan siapa Boryokudan, maka dengan segera mereka akan menjawab Boryokudan ialah penjahat yang terorganisir, pekerjaannya kebanyakan memeras dan mencari uang dari kegiatan judi dan bisnis obat terlarang.

2. Apa dan siapa Boryokudan

Apa dan siapa Boryokudan itu? NPA mengidentifikasi Boryokudan sebagai "an organization that collectively and habitually commits violent crimes backed up by organized power". NPA melihat Boryokudan sebagai organized crime yang disampaikan oleh John Smith, QPM (Assistant Commissioner, New Scotland Yard), kondisi Boryokudan memenuhi unsur-unsur tersebut, yaitu:

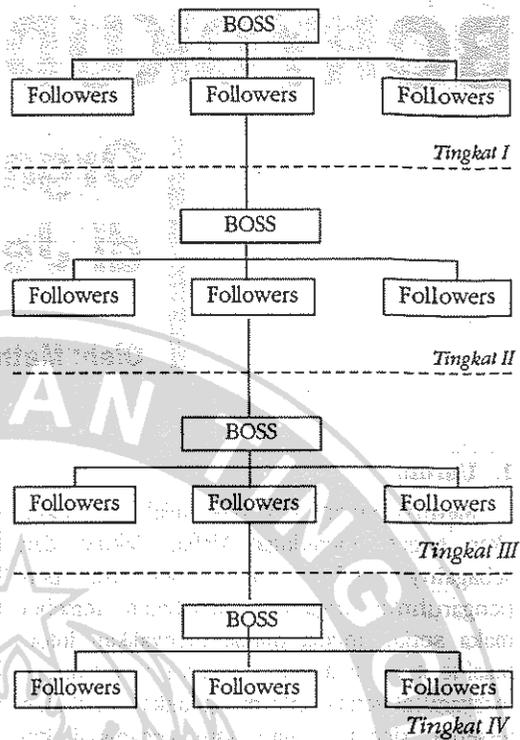
- a. Organized Crime merupakan produk dari sebuah komplotan penjahat yang kemudian diabadikan sendiri oleh kelompok tersebut. Boryokudan merupakan kumpulan pelaku kejahatan yang selanjutnya mengembangkan diri dalam satu organisasi.
- b. Organized Crime merupakan organisasi yang sifatnya tetap dan berlanjut. Unsur ini memberikan petunjuk bahwa walaupun seorang atau lebih anggotanya tertangkap, tidak akan berpengaruh kepada organisasi. Hal ini dimungkinkan terjadi oleh karena

setiap anggota berjanji untuk melindungi atau tidak melibatkan pimpinan organisasi.

- c. Anggota organisasi dididik dan berada di bawah kontrol disiplin yang keras dan ketat, unsur ini diterapkan oleh Boryokudan dan konkritnya dalam bentuk *Yubizume*, yaitu tindakan memotong jari kelingking di depan *Oyabun* (Pimpinan tertinggi Boryokudan) apabila anggota tersebut menghadapi kegagalan dalam suatu aksi kejahatan.
- d. Sumber dana diperoleh dari kegiatan anggota organisasi baik dengan cara yang benar maupun dengan cara curang, cara legal maupun ilegal. Bagi Boryokudan, cara ilegal yang ditempuh adalah:
 - 1) Perdagangan obat terlarang/narkotik;
 - 2) Judi/judi liar;
 - 3) Jasa/uang keamanan;
 - 4) Penagih utang/debt collector;
 - 5) Tukang pukul.
- e. Pimpinan organized crime tidak dilibatkan oleh anggota dalam suatu tindak kejahatan sehingga dengan demikian pimpinan organisasi tidak perlu takut terhadap suatu tuntutan hukum. Unsur ini erat hubungannya dengan unsur b di atas. Pimpinan Boryokudan sulit dibuktikan keterlibatannya dalam suatu kasus karena kuatnya komitmen anggota organisasi untuk melindungi organisasi dan pimpinannya.

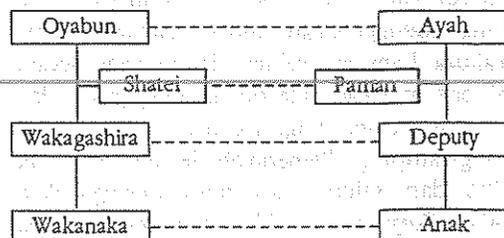
Cikal bakal Boryokudan adalah Traditional Bakuto (Professional Gamblers) dan *Tekiya* (penjual keliling pada suatu festival). Mereka secara aktif melakukan kejahatan dari waktu ke waktu. Dalam perkembangannya terdapat pula kelompok yang disebut *Gurentai*, yang muncul setelah Perang Dunia II. Dengan demikian ada tiga tipe dari kelompok penjahat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pola kerja ketiga tipe kelompok ini menjadi pola kerja dari organized crime, Boryokudan yang dikenal saat ini.

Bentuk umum organisasi Boryokudan disusun dalam empat tingkat, seperti gambar di bawah ini:



Bentuk lain dari organisasi Boryokudan, adalah organisasi *Yamaguchi Gumi*, Boryokudan terbesar dan paling ditakuti di Jepang karena keganasan dan kesadisannya. Seorang pejabat dari *Organized crime control division*, *NPA*, menjelaskan bahwa bentuk organisasi Yamaguchi Gumi menjadi bentuk umum dari seluruh organized crime yang ada di Jepang. Organisasi mereka merupakan satu ikatan kekeluargaan dengan anggota keluarga disusun sebagai berikut:

- a. *Oyabun* atau *Kumicho*, pimpinan organisasi, yang dalam susunan keluarga disebut juga ayah.
- b. *Wakagashira*, deputy Oyabun.
- c. *Wakanaka*, anggota organisasi, dalam keluarga disebut anak-anak.
- d. *Shatei*, staf Oyabun yang dalam susunan keluarga disebut paman.



Di dalam susunan keluarga seperti di atas lebih lanjut dapat diungkapkan bahwa Yamaguchi Gumi memiliki 27 orang Wakagashira, 23.100 orang Wakanaka dengan 96 orang koordinator dan 19 orang Shatei. Pimpinan organisasi bernama Yoshinori Watanabe (54) berkedudukan di Hiogo, dan mengatur kegiatan organisasinya yang bergerak hampir di seluruh Jepang. Setiap bulan masing-masing Wakagashira diwajibkan menyerahkan 100 juta yen kepada Oyabun, dan masing-masing Wakanaka menyerahkan 850.000 yen kepada Wakagashira.

Prinsip-prinsip organisasi dari Boryokudan yang mengikat seluruh anggota, adalah:

- a. Hubungan sesama anggota organisasi merupakan hubungan kekeluargaan. Pimpinan organisasi bertindak sebagai ayah dan anggota organisasi sebagai anak-anak. Dikenal juga adanya paman (saudara ayah) sebagai staf dari pimpinan organisasi.
- b. Anggota yang tidak patuh diberikan sanksi yang berat.
- c. Anggota yang terlibat dalam suatu kejahatan tidak akan melibatkan pimpinan organisasi, dengan pertimbangan untuk kepentingan organisasi dan pimpinan organisasi.
- d. Pengumpulan uang dari anggota organisasi dengan sistem upeti kepada pimpinan organisasi melalui koordinator masing-masing.

Jumlah organisasi Boryokudan di Jepang menurut data NPA adalah 24 kelompok, yaitu:

- a. Yamaguchi Gumi berkedudukan di Hiogo, dengan jumlah anggota 23.100 orang.
- b. Sumiyoshi-kai berkedudukan di Tokyo, dengan jumlah anggota 8.000 orang.
- c. Inagawa-kai berkedudukan di Tokyo, dengan jumlah anggota 7.400 orang.
- d. Kyokutou-kai berkedudukan di Tokyo, dengan jumlah anggota 2.300 orang.
- e. Matsuba-kai berkedudukan di Tokyo, dengan jumlah anggota 1.800 orang.
- f. Aizukotetsu berkedudukan di Kyoto, dengan jumlah anggota 1.600 orang.
- g. Okinawakyokuryu-kai berkedudukan di Okinawa, dengan jumlah anggota 570 orang.
- h. Dojin-kai berkedudukan di Fukuoka, dengan jumlah anggota 510 orang.

- i. Kyokuto-Sakurai berkedudukan di Shi-zioka, dengan jumlah anggota 500 orang.
- j. Kyokuryu-kai berkedudukan di Okinawa, dengan jumlah anggota 430 orang.
- k. Soai-kai berkedudukan di Tshiba, dengan jumlah anggota 430 orang.
- l. Sakaume-kumi berkedudukan di Osaka, dengan jumlah anggota 450 orang.
- m. Gouda-ikka berkedudukan di Yamaguchi, dengan jumlah anggota 370 orang.
- n. Kyosei-kai berkedudukan di Hiroshima, dengan jumlah anggota 330 orang.
- o. Dainihonheiwa-kai berkedudukan di Hiogo, dengan jumlah anggota 330 orang.
- p. Kyodo-kai berkedudukan di Hiroshima, dengan jumlah anggota 230 orang.
- q. Azuma-kumi berkedudukan di Osaka, dengan jumlah anggota 210 orang.
- r. Kosakura-ikka berkedudukan di Kago-shiwa, dengan jumlah anggota 190 orang.
- s. Azaro-kumi berkedudukan di Osaka, dengan jumlah anggota 150 orang.
- t. Taishu-kai berkedudukan di Fukuoka, dengan jumlah anggota 150 orang.
- u. Yamano-kai berkedudukan di Kumamoto, dengan jumlah anggota 100 orang.
- v. Ishikawa-ikka berkedudukan di Saga, dengan jumlah anggota 100 orang.
- w. Shiwa-kai berkedudukan di Kagawa, dengan jumlah anggota 80 orang.
- x. Kudo-rengo berkedudukan di Fukuoka, dengan jumlah anggota 600 orang.

Dari 24 organisasi Boryokudan tersebut terdapat 3 kelompok yang dijadikan target khusus dari NPA, masing-masing Yamaguchi Gumi, Sumiyoshi-kai, dan Inagawa-kai. Dalam White Paper of Police 1992, disebutkan bahwa jumlah anggota ketiga kelompok tersebut adalah 38.500 orang. Jumlah ini menunjukkan kenaikan 13.400 atau 31,70% apabila dibandingkan dengan tahun 1990.

3. Jenis kejahatan yang dilakukan Boryokudan

Pada umumnya semua anggota Boryokudan dapat melakukan seluruh jenis kejahatan, di antaranya pembunuhan, perampokan, pembakaran, perkosaan, penganiayaan, penekanan/menakut-nakuti, pemerasan, pencurian, penipuan, perjudian.

Tabel 1
Data kejahatan yang dilakukan Boryokudan
Tahun 1988-1991

No.	Kejahatan	1988		1989		1990		1991		Jumlah	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1.	Pembunuhan	1441	356	1308	345	1238	349	1251	265	5202	1315
2.	Perampokan	1771	310	1586	229	1653	362	1848	329	6858	1230
3.	Pembakaran	1629	46	1449	33	1491	34	1348	31	5917	144
4.	Kejahatan dengan kekerasan	4481	2287	39941	1896	37899	1742	35828	1556	158478	7481
5.	Penganiayaan	21516	6321	19802	5764	19436	5815	18634	5278	79388	22978
6.	Penekanan/menakuti	1102	683	1041	552	943	483	865	472	3951	2190
7.	Pemerasan	12136	4532	10861	3804	10093	3326	9582	3008	42672	14706
8.	Penipuan	65125	1313	53605	1210	50919	1076	1207	216079	4806	
9.	Perjudian	1970	3671	1559	3345	1413	3476	1201	2439	6143	12931
10.	Perkosaan	1741	242	1556	202	1548	270	1603	250	12365	964
Jumlah		153245	22150	132758	19811	106633	19325	118547	16888	511183	78174

Sumber: National Police Agency. A: Crime Total B: Boryokudan's Crime.

Dari kejahatan yang dilakukan oleh Boryokudan selama tahun 1988-1991 menunjukkan angka penurunan berturut-turut sampai dengan tahun 1991, rata-rata 8,53% setiap tahun. Apabila dibandingkan dengan total kejahatan yang terjadi di Jepang pada periode yang sama, maka tercatat 15,32% kejahatan yang terjadi dilakukan oleh Boryokudan, atau 78.174 kasus dari total 511.153 kasus.

Kondisi seperti itu dapat pula dijelaskan dengan data narapidana pembunuh penjara Fuchu (*Fuchu Prison*) di Tokyo. Dari 2.206 orang narapidana terdapat 943 orang (42,80% adalah anggota Boryokudan/mantan Boryokudan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggota Boryokudan dengan kedudukan tinggi dalam organisasi: 288 (10,3%).
- b. Anggota Boryokudan dengan kedudukan cukup tinggi: 319 (14,4%).
- c. Gangster (sama dengan Boryokudan): 99 (4,5%).
- d. Mantan Boryokudan: 292 (13,2%).

4. Sumber keuangan Boryokudan

Kegiatan pengumpulan dana Boryokudan ada yang sifatnya legal, namun ada pula yang sifatnya ilegal yang justru lebih besar dan berbahaya. Harian Kompas menulis tentang masalah kredit macet di Jepang melibatkan "Yakuza", sebagai bukti betapa organisasi kejahatan Jepang secara legal terlibat dalam kegiatan ekonomi. Bahkan disebutkan

Kementerian Keuangan Jepang telah meminta bantuan kepada kelompok Yamaguchi-Gumi untuk urusan kredit macet, dan selanjutnya organisasi kejahatan tersebut secara terbuka menjalin hubungan dengan Bank-bank besar yang ada di Jepang.

Kegiatan pengumpulan dan Boryokudan yang bersifat tradisional antara lain:

- a. Perdagangan obat-obatan terlarang/narkotik.
- b. Judi/judi liar.
- c. Jasa/uang keamanan.
- d. Penagih utang/debt collector.
- e. Campur tangan/mencampuri secara paksa urusan-urusan orang lain.
- f. Tukang pukul.

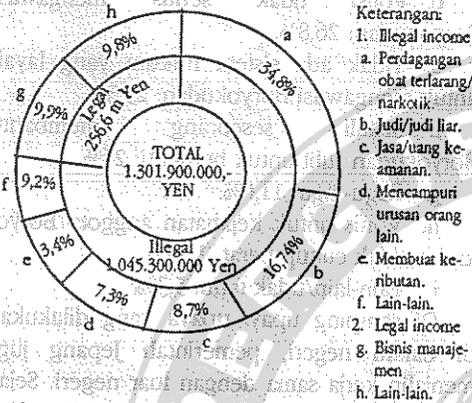
Dari pelaksanaan 4th Seminar of Investigation into Organized Crime for Asia Region Tahun 1991, diperoleh gambaran tentang sumber daya Boryokudan.

- a. Sumber daya yang sifatnya ilegal.
 - 1) Perdagangan obat-obat terlarang.
 - 2) Judi/judi liar.
 - 3) Jasa/uang keamanan.
 - 4) Campur tangan/mencampuri urusan-urusan orang lain.
 - 5) Membuat keributan.
 - 6) Lain-lain.
- b. Sumber daya yang sifatnya legal.
 - 1) Bisnis manajemen.
 - 2) Lain-lain.

Pemasukan terbesar dari sumber yang sifatnya ilegal berturut-turut:

- a. Perdagangan obat-obatan terlarang: 38,80%.
- b. Judi dan judi liar: 16,74%.
- c. Jasa/uang keamanan: 8,70%.

Diagram Penghasilan Tahunan Boryokudan



- Keterangan:
1. Illegal income
 - a. Perdagangan obat terlarang/narkotik.
 - b. Judi/judi liar.
 - c. Jasa/uang keamanan.
 - d. Mencampuri urusan orang lain.
 - e. Membuat keributan.
 - f. Lain-lain.
 - g. Bisnis manajemen.
 - h. Lain-lain.
 2. Legal income

Sumber: 4th Seminar on Investigation in to Organized Crime For Asia Region.

5. Upaya pemerintah Jepang mengawasi Boryokudan

Bagi pemerintah Jepang, Boryokudan merupakan masalah besar. Keberadaan organisasi kejahatan ini secara jelas dapat diidentifikasi oleh aparat penegak hukum Jepang termasuk NPA. Namun sejauh itu pemerintah tidak dapat mengikis habis organisasi kejahatan tersebut atau minimal menindak pimpinan organisasinya. Kesulitan untuk mengikis habis Boryokudan muncul antara lain karena Boryokudan mampu menyusup ke dalam jaringan birokrat. Kemampuan ini dimanfaatkan oleh Boryokudan untuk menjadi kuat organisasinya termasuk dalam rangka upaya pencarian dana untuk membiayai kegiatan organisasi. Contoh konkrit dapat dilihat berupa pelibatan Boryokudan sebagai debt collector untuk urusan kredit macet dalam beberapa bank besar. Contoh lain dapat pula diamati dari beredarnya kartu telepon palsu yang diedarkan oleh para anggota Boryokudan. Sumber pemalsuan adalah orang dalam telkom Jepang yang dengan mudah dapat mengetahui kode yang berlaku pada suatu masa tertentu. Kode ter-

sebut kemudian dimanfaatkan oleh Boryokudan untuk memalsukan kartu telepon yang konon dapat merugikan pihak telkom sampai 15% dari penghasilan total per bulan.

Menyadari akan problem besar tersebut, dalam memerangi Boryokudan pemerintah Jepang menerapkan dua strategi yang disebut strategi langsung, yaitu strategi penghancuran terhadap tiga pilar utama yang mendukung kegiatan organisasi, yaitu anggota organisasi, dana/uang, dan persenjataan. Strategi yang lain adalah strategi tidak langsung, yaitu berupa gerakan anti Boryokudan yang digalakkan di masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam rangka memerangi Boryokudan.

Penerapan strategi langsung dengan sasaran anggota organisasi berupa pemisahan hubungan mereka dengan pimpinan organisasi. Diharapkan dengan mengisolasi pimpinan organisasi, hubungan antara anggota dan pimpinan terputus dan ini berarti organisasi tidak jalan. Demikian pula dengan sasaran sumber dana, diharapkan dengan menghancurkan sumber dana Boryokudan, organisasi kerja kotor tersebut tidak akan bertahan lama. Hal ini sejalan dengan strategi tidak langsung berupa gerakan anti Boryokudan. Salah satu sumber keuangan Boryokudan adalah industri real estate dan konstruksi. Pemerintah berupaya untuk tidak memberikan izin kepada para konglomerat yang berindikasi ada hubungan dengan Boryokudan. Bahkan dalam rangka mengurangi keuangan Boryokudan, NPA menjalin kerja sama dengan Kantor Pajak Nasional untuk menjadikan pemasukan Boryokudan, baik yang sifatnya sah maupun yang tidak sah menjadi obyek pajak.

Selanjutnya pengawasan terhadap pilar ketiga yaitu persenjataan. Pengawasan terhadap senjata api diperketat oleh NPA/pemerintah Jepang. Diadakan perubahan terhadap hukum yang mengatur pemilikan senjata api dan pedang (senjata tajam) berupa diperberatnya sanksi, termasuk diperberatnya sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan di luar Jepang.

Tindakan lain yang ditempuh pemerintah Jepang, antara lain berupa perluasan terhadap

peraturan perundang-undangan dan kegiatan-kegiatan lain dari aparat penegak hukum dalam memerangi Boryokudan. Dalam rangka pengawauan kegiatan Boryokudan dan upaya membasmi kegiatan pengumpulan dana, pemerintah Jepang membentuk undang-undang yang dimaksudkan dapat mendukung kegiatan tersebut, antara lain:

a. The New Boryokudan Countermeasure Law.

b. The New Drug Controlling Laws; isinya yang terpenting adalah:

1) Penyitaan terhadap hasil-hasil penjualan obat terlarang/narkotik.

2) Adanya sanksi terhadap "illegal money laundering".

c. Amandement of The Law Controlling Possession of Firearms and Swords.

Pelibatan masyarakat secara aktif dalam rangka memerangi Boryokudan juga merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Walaupun pada kenyataannya terdapat pula sebagian kecil masyarakat yang memanfaatkan jasa Boryokudan, namun partisipasi aktif masyarakat membiayai polisi untuk memerangi Boryokudan patut pula menjadi catatan tersendiri. Menurut Azusa Hayashi, Kepala Polisi Prefektur Iwate (Jepang Utara), yang pernah bertugas selama lima tahun pada Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, kelompok Boryokudan yang beroperasi di Prefektur Iwate khususnya di kota Morioka adalah kelompok-kelompok Yamaguchi-Gumi, Inagawa-kai, Simiochi-kai, Kiokuto-kai dan Matshuba-kai. Menyadari akan banyaknya kelompok Boryokudan yang beroperasi di Prefektur Iwate, maka masyarakat secara sadar membuat kotak dana untuk membantu polisi memerangi Boryokudan. Pada tahun 1992 terkumpul 400 juta dari kotak dana dan 600 juta Yen sumbangan dari organisasi non pemerintah. Suatu jumlah yang cukup besar di mana kenyataan ini dapat dinilai sebagai indikator tingginya kadar kepedulian masyarakat. Namun pada saat yang bersamaan, terdapat pula kelompok masyarakat yang justru memanfaatkan jasa Boryokudan dalam penyelesaian suatu masalah. Penelitian yang dilaksanakan NPA untuk mengetahui mengapa sulit me-

ngikis habis Boryokudan telah merekomendasikan 9 alasan, yaitu:

a. Masyarakat memanfaatkan Boryokudan menyelesaikan masalahnya: 49,3%.

b. Masyarakat takut melapor karena takut pembalasan Boryokudan: 49,1%.

c. Masyarakat mengalah bila Boryokudan minta uang: 47,1%.

d. Polisi tidak serius mengawasi Boryokudan: 26,8%.

e. Tidak ada sistem hukum yang layak untuk mengawasi Boryokudan: 25,3%.

f. Sekali seseorang membantu Boryokudan sulit untuk berhenti: 24%.

g. Ragu-ragu: 11,6%.

h. Vonis untuk kejahatan anggota Boryokudan tidak cukup berat: 11,4%.

i. Lain-lain/tidak tahu: 5,3%.

Di samping upaya-upaya yang dilakukan di dalam negeri, pemerintah Jepang juga menjalin kerja sama dengan luar negeri. Sejak tahun 1980 setiap dua tahun sekali Jepang dan USA telah menjalin kerjasama dengan mengadakan konferensi tentang organized crime, dan saat ini telah berlangsung delapan kali. Kerjasama juga dijalin dengan negara-negara ASEAN, Korea dan Hongkong dengan menyelenggarakan seminar-seminar tentang organized crime di Asia dan diselenggarakan di Tokyo. Hal ini sangat penting artinya tidak saja bagi Jepang, akan tetapi juga bagi negara-negara mitra yang justru harus lebih waspada akan adanya perluasan kegiatan Boryokudan ke luar negeri.

Kendati sebagian besar pejabat di NPA dan beberapa pejabat di Prefektur mengatakan belum terdapat adanya indikasi hubungan Boryokudan dengan luar negeri, akan tetapi perlu diwaspadai bahwa setiap tahun lebih dari 2000 orang gangster/Boryokudan melakukan perjalanan keluar negeri.

6. Bagaimana dengan Indonesia

Sampai dengan tahun 1990, tidak satu pun yang menyatakan bahwa di Indonesia telah terdapat organized crime, walaupun kadang-kadang tersirat dalam beberapa keterangan para pejabat bahwa indikasi ke arah itu tidak pernah tertutup. Akan tetapi pada tahun-tahun terakhir ini, terdapat beberapa pejabat yang mulai berbicara tentang organized crime di

Indonesia. Apabila disejajarkan dengan Boryokudan yang ada di Jepang, organisasi kejahatan yang ada di Indonesia tentu belum memadai. Namun dengan belajar pada pengalaman Jepang, serta dengan mencermati modus operandi dari beberapa kasus/kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu maka kiranya hal tersebut dapat dijadikan masukan yang berharga untuk membasmi cikal bakal organized crime di Indonesia.

Pada 4th Seminar on Investigation into Organized Crime For Asia Region, tahun 1991, Kol. Pol. Drs. Ahwil Lutan (sekarang Brigjen. Pol.) dan Letkol. Pol. Drs. Trimada Dhany (sekarang Kol. Pol.) menjelaskan bahwa "walaupun Indonesia berada dalam kondisi seperti itu (terdiri dari ratusan etnik/suku bangsa, berbagai latar belakang yang berbeda, dialek, kebiasaan dan budaya), namun organized crime di Indonesia baru pada tingkat embrio yang dengan cepat dapat diantisipasi, sehingga tidak berkembang menjadi organized crime yang diorganisasikan secara rapi, (terjemahan bebas dari naskah asli: "Although Indonesia is in such a condition, however organized crime in Indonesia has only reached an embryonic level which can be early anticipated so that it doesn't develop into an organized crime which is neatly organized").

Setelah memberikan beberapa contoh tentang beberapa kelompok seperti kelompok golek merah dan sebagainya, selanjutnya ditegaskan pula oleh Kol. Pol. Drs. Ahwil Lutan bahwa "Berbicara tentang organized crime di Indonesia dengan contoh-contoh embrio tadi, maka diketahui bahwa tidak ada group di Indonesia seperti Yakuza di Jepang. Kejahatan yang terjadi dilakukan oleh beberapa orang bukan oleh organized crime".

Pandangan tentang organized crime seperti dijelaskan di atas, hendaknya menjadi pendorong bagi segenap aparat keamanan untuk tetap mewaspadaai berkembangnya embrio organized crime. Apabila dikaitkan dengan kondisi yang ada saat ini, Indonesia seyogianya tidak perlu bangga bahwa sampai saat ini belum terdapat kelompok pelaku kejahatan yang terorganisir. Adanya kelompok curanmor Beny Feo, debt collector, preman yang memeras masyarakat di lokasi tertentu, menunjukkan adanya kesamaan dengan sumber keuangan Boryokudan di Jepang. Mengamati

keberadaan organized crime di Indonesia hendaknya alam pikiran tidak dikonstruksikan dengan organized crime yang ada di Jepang. Pemikiran hendaknya difokuskan kepada terorganisirnya beberapa orang pelaku, dikoordinasikan oleh seseorang yang dianggap pemimpin, untuk anggota yang lain. Pada kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa telah ada kelompok pelaku kejahatan yang terorganisir secara sederhana. Berbeda dengan Boryokudan bahwa kelompok pelaku kejahatan di Indonesia jenis kejahatan yang dilakukan hanya satu/sejenis, dapat membubarkan diri bila salah seorang anggotanya tertangkap aparat keamanan karena tidak ada kewajiban yang tegas untuk melindungi pimpinan dan anggota yang lain.

Kelompok lain yang perlu diwaspadai adalah maraknya permainan bola tangkas atau permainan ketangkasan lain dengan menggunakan mesin. Kalau permainan bola tangkas/bola gelinding dikategorikan sebagai judi seyogianya semua pihak waspada bahwa terdapat beberapa instansi terkait yang seolah tidak melihat permasalahan tersebut sebagai sesuatu yang serius. Ada kesan terdapat kerja sama terselubung antara para pemilik permainan ketangkasan dengan birokrat dan kondisi ini sama halnya dengan kondisi Boryokudan yang ada di Jepang, di mana secara terselubung mereka dapat menyusup ke dalam jaringan birokrat, implikasi dari penyusupan tersebut tidak terlalu sederhana dan hendaknya ditempatkan sebagai ancaman yang pada gilirannya baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segenap sendi kehidupan masyarakat.

7. Penutup

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi Jepang saat ini adalah masalah Boryokudan/organized crime. Pembahasan tentang Boryokudan di atas memberikan gambaran tentang kesulitan pemerintah Jepang memerangi Boryokudan. Pengalaman ini hendaknya dijadikan cermin untuk tetap mewaspadaai perkembangan organized crime di Indonesia. Walaupun keberadaannya baru pada tingkat embrio, namun kondisi tersebut merupakan ancaman yang kiranya belum terlambat untuk dieliminasi.

Letkol. Pol. Drs. Mathius Salempang adalah Perwira Siswa Sespim Polri, Dikreg ke 31, TP. 1995/1996.

AM. 1494 KHz

RBS RADIO
BLORA
SAKTI

Studio/Office:

Jalan Raya Bypass CEPU - 58311

Phone: (0296) 21503

Branch Office:

Jalan Rasamala I/436 SEMARANG - 50235

Phone: (024) 472289

BHAKTI - DHARMA - WASPADA
MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI
KE-31
1965 - 1996